

Judul : DPR minta KLHK gencarkan penegakan hukum
Tanggal : Rabu, 14 September 2022
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 13

ANTARA/GALII/PRADITA

DPR Minta KLHK Gencarkan Penegakan Hukum

KOMISI IV DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) 2023 sebesar Rp6,9 triliun untuk kemudian dibahas kembali dengan Badan Anggaran.

Anggaran terbesar KLHK akan dialokasikan untuk konservasi sumber daya alam dan ekosistem

sebesar Rp1,6 triliun dan pengendalian daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan sebesar Rp1,3 triliun.

Sementara itu, sumber pendapatan pada 2023 sebagian besar akan berasal dari pendapatan negara bukan pajak (PNBP) Rp5,2 triliun dan juga hibah dari luar

negeri Rp253,26 miliar.

Kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, DPR meminta agar penegakan hukum (gakkum) di sektor kehutanan dan lingkungan hidup digencarkan.

"Komisi IV DPR mendukung Ditjen Gakkum KLHK untuk melakukan penegakan hukum atas kegiatan penambangan ilegal di seluruh Indonesia, khususnya di Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara," kata Wakil Ketua Komisi IV Ang-

kemarin.

Senada, anggota Komisi IV dari Fraksi PDIP Sutrisno menilai PNBP KLHK seharusnya bisa lebih dari Rp5,2 triliun, jika masalah penerbitan pemanfaatan lahan hutan oleh pelaku tambang dan kebun sawit secara ilegal dituntaskan.

"Ada sebanyak kurang lebih 841 hektare lahan kehutanan yang digunakan untuk pertambangan dan kebun kelapa sawit ilegal kurang lebih 2,9 juta hektare. ini dipastikan belum dipungut PNBP. Mestinya ini dimasukkan dengan target penyelesaian pada 2023 dan dipastikan jumlahnya tentu cukup besar," serunya.

Dalam rapat itu, Menteri LHK mengungkapkan Manggala Agni yang merupakan brigade pengendalian kebakaran hutan dan lahan menjadi jabatan fungsional di KLHK.

"Kami sedang terus berupaya mendukung Manggala Agni soal kebijakan tenaga honorer dari kementerian lain yang kita komunikasikan Kementerian PAN-Rebiro dan telah disetujui bertahap," kata Siti.

Saat ini sendiri, telah ada sebanyak kurang lebih 1.500 personel Manggala Agni yang tersebar di 34 daerah operasional di seluruh Indonesia. (Ata/H-2)